



TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945

## Jurnalis di Medan Tolak RUU Penyiaran



Medan, MIMBAR - Rancangan Undang-undang Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I DPR-RI menuai polemik. Berbagai organisasi profesi Jurnalis di seluruh Indonesia pun menggelar unjuk rasa dan pernyataan sikap menolak Rancangan Undang-undang yang dinilai dapat menggerus prinsip kebebasan pers tersebut.

■ Bersambung ke Hal 11



### 7 Gugatan Pileg PPP Kandas di 'Tangan' MK

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar putusan dismissal terhadap 155 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu 2024 hari ini, Selasa (21/5).

Dari 155 perkara PHPU Pileg yang diputus hari ini, sebanyak 15 di antaranya adalah perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Putusan dismissal ini merupakan penentu apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke sidang pembuktian atau tidak.

■ Bersambung ke Hal 11

### Jadwal Salat

14 ZULKALDAH 1445 H

Subuh : 04:53 WIB	Maghrib : 18:34 WIB
Zuhur : 12:25 WIB	Isya : 19:47 WIB
Ashar : 15:48 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

### Hidayah

#### Manusia Merugi

Oleh Dr A Rasyid, MA



APAKAH kita termasuk manusia merugi? Pertanyaan seperti ini terkadang ada baiknya juga diajukan kepada diri kita sendiri, sebagai intropeksi diri. Tetapi pertanyaan ini sebaiknya kita pertegas lagi. Apakah kita rugi secara materi atau rugi dalam amal ibadah. Atau kita rugi kedua-duanya.

Kerugian secara materi dapat dihitung dengan menggunakan angka-angka. Misalkan sepanjang hidup kita seberapa banyak harta benda yang kita miliki dibandingkan dengan mereka yang sudah memiliki. Ukurannya tentu tidak begitu sulit. Orang terkaya di tanah air saat ini menurut laporan versi Forbes adalah Prajogo Pangestu (80 tahun) | US \$66,4 miliar atau

■ Bersambung ke Hal 7

## Pemerintahan Jokowi Dapat Report Merah



Jakarta, MIMBAR - Aktivis 98 yang juga pentolan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Ubedillah Badrun, memberikan rapor merah terhadap jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini di hari peringatan 26 tahun

era Reformasi.

Pasalnya, sejumlah faktor masih terjadi dari mulai demokrasi yang merosot, korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang merajalela hingga hak asasi manusia (HAM) yang memburuk. Hal itu disampaikan Ubedil-

lah dalam aksi instalasi peringatan 26 tahun Reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

■ Bersambung ke Hal 11

### Terkait Pengelembungan Suara

## Tiga PPK Medan Timur Divonis Ringan

### ● Jaksa Banding



Medan, MIMBAR – Tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur divonis 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tiga PPK itu Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut (25), Junaidi Machmud (48), dan Muhammad Rachwi Ritonga (28) dinilai terbukti bersalah atas pengelembungan suara di Pemilu 2024.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana turut serta secara sengaja menyebabkan peserta pada pemilu mendapatkan penambahan suara sebagaimana dari dakwaan alternatif pertama,” kata Ketua Majelis Hakim, As’ad Rahim Lubis, Selasa (21/5).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan. Denda Rp 25 juta dengan ketentuan apabila denda itu

■ Bersambung ke Hal 11

### PENGUSUTAN KORUPSI TIMAH

## Tersangka TPPU Jadi 6 Orang

Jakarta, MIMBAR - Jumlah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengusutan korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk bertambah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, saat ini tersangka TPPU dalam kasus yang merugikan negara Rp 271 triliun itu sudah berjumlah enam orang.

“TPPU (kasus korupsi) timah itu, sudah enam orang,” kata Febrie saat ditemui Republik.co.id di Gedung Kartika, di Kejangung, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

“Itu ada RI, HLN, HM, SG, TN, dan si SP,” kata Febrie melanjutkan. Tersangka RI mengacu pada nama Robert Indarto tersangka selaku Dirut PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS). Tersangka HLN adalah Helena Lim yang merupakan Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange (QSE). Tersangka HM adalah Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi yang merupakan perwakilan kepemilikan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

■ Bersambung ke Hal 11

### PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Hari Waisak yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2024 yang merupakan LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA tanggal 24 Mei 2024, Koran Mimbar Umum TIDAK TERBIT tanggal 23 dan 24 Mei 2024, dan Terbit Kembali pada hari Senin, 27 Mei 2024.

Demikian PENGUMUMAN ini diperbuat, agar pembaca maklum.

\*MANAGEMENT\*



■ Pembungkaman ...  
■ Ckckck..

## 7 Gugatan...

**Dari Halaman 1** dalam petitem Permohonan Pemohon," imbuhnya.

### 2. Sengketa Pileg DPR di Dapil Jateng III

PPP juga memperlakukan penghitungan suara di daerah pemilihan Jateng III yang diduga lari ke Partai Garuda.

Dalam perkara ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan permohonan PPP terkait perolehan suara calon anggota DPR dapil Jawa Tengah III terdapat posita yang kabur.

Sebab, dalam permohonan tidak dijelaskan kapan waktu dan di mana lokasi terjadinya peristiwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

MK tidak menemukan uraian yang terperinci menjelaskan berapa perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, Kecamatan, Kota, Provinsi, atau Nasional yang dipermasalahkan oleh pemohon.

Selain itu, MK juga tidak menemukan uraian penjelasan mengapa terjadinya pengurangan suara PPP dan terjadinya penambahan suara Partai Garuda pada daerah pemilihan Jawa Tengah III itu. Meskipun PPP sudah menyajikan daftar alat bukti perbaikan tertanggal 29 April 2024.

### 3. Sengketa Pileg DPR di Dapil Kaltim

MK memutuskan tidak menerima gugatan PPP terkait hasil Pileg di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga pindah ke Partai Garuda.

Putusan dismissal perkara Perkara 216-01-17/PHPU. DPR- DPRD-XXII/2024 ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo pada hari ini.

"Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan terdapat perbedaan locus dalam posita yang dibuat oleh PPP. Partai yang diketuai oleh Mardiono itu memperlakukan suara di Kalimantan Timur. Namun, data yang disajikan adalah hasil penghitungan suara di daerah pemilihan Jawa Tengah III.

Menurut mahkamah, permohonan PPP itu menjadi

sulit dipahami dan kabur.

### 4. Sengketa Pileg di Papua Tengah

MK juga tidak menerima gugatan PHPU terkait perpindahan suara dari PPP ke PDIP di Dapil Papua Tengah dengan nomor perkara dengan nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan permohonan PPP tak diterima lantaran tidak jelas dan kabur. Enny mengatakan PPP tidak menjelaskan bagaimana peristiwa perpindahan suara itu terjadi.

"Pemohon tidak menjelaskan locus terjadinya perpindahan suara secara spesifik," kata Hakim Enny dalam sidang Pileg putusan dismissal di gedung MK, Jakarta Pusat.

"Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan suara yang pindah dan dipindah itu dari suara partai politik atau dari suara calon legislatif partai politik," sambungannya.

### 5. Sengketa Pileg di Dapil Aceh II

MK tidak menerima gugatan sengketa PHPU dari PPP yang menyebut terjadi perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil II Aceh.

Permohonan dengan nomor perkara 168-01-17-01/PHPU.DPR- DPRD-XXI/2024 dinyatakan MK tidak jelas atau kabur lantaran pemohon tak merinci secara jelas perpindahan suara tersebut.

"Bahwa Pemohon dalam permohonan juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci apakah peristiwa migrasi suara pemohon ke Partai Garuda tersebut berasal dari suara Partai Pemohon atau suara caleg partai Pemohon," kata Hakim Arief Hidayat dalam sidang Pileg putusan dismissal di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

"Bahwa Pemohon di dalam Permohonan awal mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 10.000 suara ke PDIP. Namun, di dalam Permohonan bertanggal 27 Maret 2024, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 5.300 dari Partai Garuda sehingga menunjukkan

dalil permohonan Pemohon yang tidak konsisten," sambungannya. MK juga menyatakan pemohon tidak merujuk sama sekali kepada alat bukti tertentu dalam setiap dalil permohonannya. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023.

"Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak jelas atau kabur," tutur Arief.

### 6. Sengketa Pileg di Banten

MK memutuskan tidak menerima gugatan PPP terkait dugaan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Banten. MK menganggap permohonan PPP tidak memenuhi syarat formil.

"Mengadili, sebelum menajutahkan putusan akhir menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI dapil Banten I, DPR RI dapil Banten II, DPR RI dapil Banten III dan DPRD Kota Tangerang dapil Kota Tangerang 4 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan permohonan PPP terkait perolehan suara di Dapil Banten I, Banten II, Banten III tidak diuraikan dengan jelas. Guntur menyebut PPP juga tidak mencantumkan di daerah mana saja perpindahan suara itu terjadi.

### 7. Sengketa Pileg Dapil Lampung 1 dan 2

MK menyatakan tak dapat menerima PHPU Pileg anggota DPR RI dapil Lampung I dan II yang diajukan PPP. Putusan Perkara Nomor 209-01-17-08/PHPU. DPR- DPRD-XXII/2024 itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK hari ini.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK memeriksa secara seksama permohonan pemohon. Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai di tahap mana terjadinya kesalahan penghitungan tersebut yang kemudian ditetapkan oleh termohon.(**enni/js**)

## Pemerintahan Jokowi...

**Dari Halaman 1**

Adapun tersangka SG, adalah Suwito Gunawan yang ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka TN adalah Tamron alias Aon yang dijejloskan ke tahanan terkait perannya selaku benefit official dari CV Venus Inti Perkasa (VIP). Terakhir tersangka SP adalah Suparta, yang ditetapkan tersangka atas perannya selaku Dirut PT RBT.

Kata Febrie, enam tersangka korupsi dan juga TPPU dalam perkara timah tersebut diyakini bertambah sepanjang penyidikan berjalan. "Ini kita usahakan cari terus untuk TPPU-nya. Karena kerugian negaranya ini besar sekali," kata Febrie.

Kerugian negara dalam pengusutan korupsi timah ini mencapai Rp 271 triliun. Nilai tersebut merupakan kerugian akibat kerusakan lingkungan dan ekologis dampak dari penambahan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Penyidik Jampidsus menggunakan hasil penghitungan tim ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) itu untuk menguatkan angka kerugian perekonomian negara. Sedangkan kerugian keuangan negara, penyidik

masih menunggu hasil penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun dalam penyidikan sementara ini, Jampidsus-Kejagung sudah menjerat 21 orang sebagai saksi tersangka. Tiga di antaranya adalah penyelenggara negara dari lingkungan pejabat Kedinasan ESDM Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan tiga tersangka lainnya adalah pejabat tinggi di PT Timah Tbk.

Adapun tersangka lainnya dari kalangan swasta. Pada Selasa (21/5/2024) proses penyidikan berjalan Jampidsus-Kejagung melanjutkan pengusutan dengan memeriksa empat orang sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, empat yang diperiksa tersebut adalah YF, RD, AB, dan HN. "Keempatnya diperiksa sebagai saksi," ujar Ketut, Selasa (21/5/2024).

YF diperiksa selaku administrator PT Mutiara Alam Lestari (MAL). RD diperiksa selaku karyawan di PT VIP. AB diperiksa selaku pekerja di CV VIP. Dan HN diperiksa selaku Direktur CV Mega Belitung. (**rep/js**)



## Hidayah Manusia Merugi

**Dari Halaman 1**

sekitar Rp 1,06 kuadriliun petrokimia, energi urutan ke-24 dunia. Dibanding dengan kita tentu tidak ada apa-apanya.

Apakah Prajogo Pangestu termasuk manusia yang beruntung dalam hidupnya. Secara materi tentu tidk bisa dibantah lagi. Kita salut dengannya karena mampu mengumpulkan kekayaan sebanyak itu hingga usianya di angka 80 tahun. Tentu saja banyak manusia yang bercita-cita hidup seperti Prajogo Pangestu yang bergelimang harta itu.

Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah kekayaan bisa membawa kita kepada keberuntungan dunia dan akhirat? Alquran Surat al 'Ashr (1-3): telah mengingatkan kita semua; "1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati dalam mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran." Orang tidak merugi

dalam konsep Alquran adalah yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati dalam mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran.

Surat Al Ashr menjadi surat yang memiliki makna dan keutamaan yang bermanfaat bagi umat muslim karena isinya Allah menyerukan umat muslim untuk dapat melakukan amal sholeh sebanyak-banyaknya dan saling menasihati pada kebaikan. Semua itu dilakukan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang merugi.

Kandungan makna ayat dalam surat Al Ashr tersebut mengandung keutamaan untuk mengingatkan kepada orang-orang iman agar dapat memperbaiki amal sholeh dan juga saling menasihati pada kebaikan. Semua itu dilakukan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang merugi. Nabi Muhammad SAW bersabda : "Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya dan seburuk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya." (H.R Tirmidzi). \*\*\*

**Dari Halaman 1**

Adapun tersangka SG, adalah Suwito Gunawan yang ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka TN adalah Tamron alias Aon yang dijejloskan ke tahanan terkait perannya selaku benefit official dari CV Venus Inti Perkasa (VIP). Terakhir tersangka SP adalah Suparta, yang ditetapkan tersangka atas perannya selaku Dirut PT RBT.

Kata Febrie, enam tersangka korupsi dan juga TPPU dalam perkara timah tersebut diyakini bertambah sepanjang penyidikan berjalan. "Ini kita usahakan cari terus untuk TPPU-nya. Karena kerugian negaranya ini besar sekali," kata Febrie.

**Dari Halaman 1**

Puluhan Jumalis di Kota Medan, Sumatera Utara yang tergabung dalam aliansi organisasi profesi Jumalis, yakni Ikatan Jumalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Aliansi Jumalis Independen (AJI) Kota Medan, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, menggelar unjuk rasa menolak RUU Penyiarian ini di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Selasa (21/5).

Dalam orasinya, para Jumalis menuntut DPRD Sumatera Utara untuk ikut serta menyatakan sikap menolak RUU Penyiarian yang dinilai sebagai ancaman kebebasan pers dan menggerus nilai-nilai demokrasi.

Ketua IJTI Sumut, Tuti Alawiyah Lubis menegaskan, RUU Penyiarian merupakan wujud pembungkaman terhadap kerja-kerja Jumalis. "Kita sangat menyayangkan RUU Penyiarian yang terbaru sekarang salah satunya tentang jurnalisme investigasi yang kita sangat sayangkan itu keluar dari komisi satu yang membidangi hal itu dan salah satu anggota di sana merupakan mantan-mantan Jumalis dimana mereka juga pernah bekerja seperti halnya kita," ungkapnya didampingi Ketua AJI Medan, Tison Pane dan Ketua PFI Medan, Risky Cahyadi.

Dirinya menilai bahwa RUU Penyiarian yang di

## Tersangka TPPU...

Kerugian negara dalam pengusutan korupsi timah ini mencapai Rp 271 triliun. Nilai tersebut merupakan kerugian akibat kerusakan lingkungan dan ekologis dampak dari penambahan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Penyidik Jampidsus menggunakan hasil penghitungan tim ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) itu untuk menguatkan angka kerugian perekonomian negara. Sedangkan kerugian keuangan negara, penyidik masih menunggu hasil penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun dalam penyidikan sementara ini, Jampidsus-Kejagung sudah menjerat 21 orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya adalah penyelenggara negara dari lingkungan pejabat Kedi-

## Jurnalis di Medan...

dalamnya terdapat pembatasan-pembatasan dan aturan yang akan dibuat nantinya akan memengaruhi profesi Jurnalis dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atau kebutuhan akan mendapatkan informasi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani yang menerima massa aksi mengatakan bahwa dirinya beserta pimpinan DPRD Sumut lainnya mengundung perwakilan para Jumalis di Medan pada hari Senin (27/5/2024) mendatang untuk mendiskusikan RUU Penyiarian ini dan menyatakan sikap bersama. "Kalau secara pribadi hati saya juga sama dengan semua Jumalis. Saya ini anak Jumalis. Tuntutan apapun yang ada di DPRD Sumut ini tentunya kewajiban kami untuk meneruskannya ke DPR RI sana," katanya.

MASIH DI BALEG

Komisi I DPR telah dan akan terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiarian sebagai bahan masukan.

Draf Revisi Undang-Undang (RUU) No.32 Tahun 2022 Tentang Penyiarian, yang sedang bergulir di badan legislatif DPR RI menjadi polemik lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menepis tudingan bahwa RUU)

## Tiga PPK

**Dari Halaman 1**

Hutasuhut atas persetujuan terdakwa Muhammad Rachwi Ritonga meminta kode Aplikasi Sirekap di tingkat kecamatan kepada terdakwa Junaidi Machmud beserta password dan kode OTP.

Setelah itu, terdakwa Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut pun membuka Aplikasi Sirekap tersebut dan memindahkan suara dari Partai Buruh dan PKN ke PKB.

Di mana pada saat itu sedang berlangsung rekapitulasi suara untuk seluruh partai peserta pemilu pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh seluruh anggota PPK dan dihadiri oleh para saksi yang diutus oleh partai peserta pemilu dengan sistem penghitungan suara atau rekapitulasi suara, yaitu dengan cara menayangkan C Plano dengan menggunakan alat proyektor.

Sementara, terdakwa Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut menginput rekapitulasi suara ke dalam Microsoft Excel yang hasilnya akan dibagikan kepada para saksi dari partai peserta pemilu.

Setelah rekapitulasi suara selesai dilakukan oleh ketiga terdakwa, kemudian pada Sabtu (2/3/2024) saksi partai meminta hasil Berita Acara Penghitungan Suara atau D Hasil, karena belum finalisasi.

Sehingga, ketiga terdakwa memberikan dan membagikan rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk Microsoft Excel kepada para saksi peserta pemilu yang salah satunya adalah saksi dari PKB, Partai Gerindra, Partai Buruh, dan PKN.

Ternyata, hasil rekapitulasi suara yang dilakukan ketiga terdakwa terdapat perbedaan jumlah suara antara C Plano yang dibuat oleh KPPS dengan D Hasil yang dibuat oleh PPK Medan Timur.

Di mana hal tersebut dikarenakan adanya pemindahan suara dari PKN dan Partai Buruh ke PKB. Sehingga, PKB memperoleh tambahan suara dari kedua partai tersebut.

Selanjutnya, pada Senin (4/3/2024), PPK Medan Timur memberikan D Hasil kepada seluruh saksi partai yang ditandatangani oleh ketiga terdakwa dan para saksi peserta partai pemilu.

Kemudian, keesokan harinya tepatnya Selasa (5/3/2024), seluruh kotak dan surat suara beserta C Plano atau C Hasil dan juga D Hasil didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan dan pihak KPU Medan mengesahkan D Hasil yang dikeluarkan PPK Medan Timur dengan mekanisme Rapat Pleno. Di hari yang sama, sekira pukul 05.00 WIB, saksi Sarmak Hasbi Sidqi Hasibuan sebagai Komisioner

tersebut menghilangkan atau mengecilkan peran pers. "Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran pers," kata Meutya dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan pula, Komisi I DPR menyadari bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah penting. Bahkan, lanjut dia, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selaku mitra kerja, terjalin sinergis dan saling melengkapi, baik saat Dewan Pers diketuai oleh Bagir Manan (2010-2016), Mohammad Nuh (2019-2022), hingga Azyumardi Azra (2022).

Hal itu, kata Meutya, dibuktikan pihaknya dalam upaya mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres "Publisher Rights".

Meutya pun menuturkan bahwa draf RUU Penyiarian saat ini masih berada di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan belum dilakukan pembahasan dengan Pemerintah.

"RUU Penyiarian saat ini belum ada, yang beredar saat ini adalah draf yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multi tafsir," katanya. (A-10)

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Timur telah mengetahui adanya pengelembungan suara.

Keesokan harinya, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan menerima informasi awal secara tertulis dari Calonera Netty Yuniati Siregar yang merupakan Pengacara Legislatif (Caleg) Kota Medan dari Partai Gerindra terkait adanya pengelembungan suara.

Selanjutnya, Bawaslu Medan membuat laporan atau temuan adanya pengelembungan suara yang dilakukan tingkat PPK ke KPU Medan, akan tetapi tidak diindahkan setelah sampai penetapan pada tanggal 12 Maret 2024.

Kemudian, dengan adanya penambahan suara ke PKB, Netty Yuniati Siregar pun merasa dirugikan atas hal tersebut. Sehingga, jumlah suara yang diperoleh Partai Gerindra tidak masuk untuk mendapatkan kursi ke-12 sesuai dengan pembagian dari KPU Kota Medan.

**JAKSA BANDING**

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Medan langsung menyatakan banding atas vonis 3 bulan penjara terhadap tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur dalam kasus pengelembungan suara di Pemilu 2024.

Tiga PPK yang dimaksud yaitu Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut (25), Junaidi Machmud (48), dan Muhammad Rachwi Ritonga (28).

Kepala Kejari Medan Muttaqin Harahap dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim dalam perkara ini.

"Yang mana putusan majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pasal yang kami sangkakan. Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi," kata Muttaqin kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).

Mantan Asisten Kejati Banten itu juga menjelaskan jika dibandingkan dari tuntutan 1 tahun jaksa penuntut umum, putusan hakim masih sangat jauh dengan keadilan masyarakat.

"Oleh karena itu terhadap putusan yang baru dibacakan tadi kami sudah menggambil sikap mengajukan upaya hukum banding," tegasnya.

Atas upaya banding itu, Kejari Medan berharap agar Pengadilan Tinggi (PT) Medan bisa lebih meneliti perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Harapan kita selaku penuntut umum, PT Medan memutuskan confrom dengan tuntutan kita sebagai penuntut umum," ucapnya.(A-08/js)